

## **DAFTAR BACAAN**

### **I. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara,  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang  
Pelayanan Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5038.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang  
Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 5601

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pe-  
rubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003  
tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 7097.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang  
Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003  
tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2025 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara  
Nomor 7142.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.128/PUU-XXIII/2025 tentang  
Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang  
Kementerian Negara terhadap UUD 1945.

## II. Buku

- Bagir Manan dan Kuntanan Magnar, (2017) *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, Bandung: PT. Alumni
- Daniri M.A.,(2006) *Good Corporate Governance,konsep dan penerapannya Dalam Konteks Indonesia*, Jakarta: Ray Indonesia
- Jimly Asshiddiqie, (2019) *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers
- Kenari Purnama, (2025), *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara*, Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Komite Nasional Kebijakan Governance, (2006), *Pedoman Umum GoodCorporate Governance* , Jakarta: KNKG
- Peter Mahmud Marzuki, (2021), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana
- Rudhi Prasetya, (2011) *Teori & Praktik Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika
- Saldi Isra, (2010), *Pergeseran Fungsi Legislasi: Penguatan Model Legislasi dalam Sistem Presidensial* , Jakarta: Rajawali Pers
- Tuti Rastuti, Gandhi Pharmacist dan Tisni Santika, (2018), *Aspek Hukum Pengelolaan Perusahaan*, Bandung: PT Refika Aditama
- Wawan Zulaiman , (2021) *Aturan Penilaian Bisnis BUMN*, Jakarta, Jala Permata Aksara

## III. Jurnal

- Andryan, (2024), Efektivitas Wakil Menteri Negara sebagai Pembantu Presiden dalam Sistem Presidensial,Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara
- Anvy, F. P., Herawaty, N., & Rahayu. (2025), Pengaruh penerapan prinsip good corporate governance terhadap kinerja keuangan pada PT Perkebunan Nusantara
- Dewo Deddi Ananda. (2023) Analisis Hukum Larangan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero.

Imbago, (2022) Analisis Yuridis Kewenangan Wakil Menteri Berdasarkan Peraturan Presiden.

Indrayan Prananta, (2020), Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan

La Ode Hariru, (2022) Kedudukan Hukum Badan Usaha Milik Negara(Persero) sebagaiPerusahaan Berbadan Hukum

Nisa Afifa1, Abdul Halim Barkatullah, Yulia Qamariyanti, (2022), Pengangkatan Komisaris Independen Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik) Pada Perseroan Terbatas

Rini Wulani Aisyah dan Budiyono Pristiyad, (2021), Makna Rangkap Jabatan dalam Pencapaian Produktivitas yang Optimal pada PT Barito Sarana Karya Gresik

#### **IV. Media Massa**

CNN Indonesia, “Daftar Wamen Jadi Komisaris BUMN di Tengah MK Larangan Rangkap Jabatan”, *CNN Indonesia*, 29 Agustus 2025.

Hukumonline, “17 Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan Penjelarasannya” *Hukumonline*, 10 Desember 2025.

Hukumonline, “Konsep ‘Rule of Law’ dan Penerapannya di Indonesia”, *Hukumonline*, 23 September 2025.

JadiBUMN.id, “Jelajahi Arti Komisaris BUMN dan Peran Pentingnya!”, *JadiBUMN*, 14 Mei 2025.

Kompas.com, “Kegiatan Usaha yang Dilakukan oleh BUMN Bersifat Public Service”, *Kompas.com*, 2 Maret 2023.

KPU Papua Pegunungan, “Sistem Pemerintahan Presidensial: Pengertian, Ciri, dan Penerapannya di Indonesia”, *KPU Papua Pegunungan*, 17 Oktober 2025.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Wakil Menteri Dilarang Rangkap Jabatan”,*MKRI.go.id*, 28 Agustus 2025.

Transparency International Indonesia, “Potensi Korupsi dan Konflik Kepentingan Rangkap Jabatan Menteri dan Wakil Menteri”,*Transparency International Indonesia*, 20 Agustus 2025.

Accounting Binus, “Good Corporate Governance (GCG) dan Pedoman Etika dalam Perusahaan”, <https://accounting.binus.ac.id/2020/06/30/good-corporate-governance-gcg-dan-pedoman-etika-dalam-perusahaa/>, diakses 14 Oktober 2025.

GRC Indonesia, “Good Corporate Governance (GCG): Pengertian, Prinsip, Manfaat dan Contohnya”, <https://grc-indonesia.com/good-corporate-governance-gcg-pengertian-prinsip-manfaat-dan-contohnya/>diakses 8Desember 2025.

Indonesia Corruption Watch, “Research Brief: Konflik Kepentingan — RangkapJabatan”, <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/ICW%20Rangkap%20Jabatan.pdf>. diakses tanggal 8 Oktober 2025.

JadiBUMN, “Jelajahi Arti Komisaris BUMN dan Peran Pentingnya!”, <https://jadibumn.id/arti-komisaris-bumn/>, diakses 8 Desember 2025.

PPA&K, “Good Corporate Governance (GCG): Definisi, Prinsip, Tujuan, Penerapan dan Aspek”, <https://www.ppak.co.id/artikel/good-corporate-governance-gcg-definisi-prinsip-tujuan-penerapan-dan-aspek>, ;diakses 14 Oktober 2025.